



BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal

Lapangan Kerja Sektor Pertanian

Buruh tani merawat tanaman sayur di Pengalengan, Jawa Barat, belum lama ini. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) 2021, lapangan usaha dari sektor pertanian telah menyumbang terhadap PDB sebesar 13,28%. Jika menggunakan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), sektor pertanian dalam arti luas mampu menyerap tenaga kerja sekitar 29,59%.

RUPIAH TERTEKAN KEBIJAKAN THE FED

Asing Net Sell Saham dan SBN Rp 6,75 Triliun

JAKARTA – Bank Indonesia mencatat aliran modal asing keluar (*capital outflow*) mencapai Rp 7,34 triliun selama 13-16 Juni 2022. Perinciannya, asing mencetak penjualan bersih (*net sell*) Rp 6,75 triliun di pasar surat berharga negara dan *net sell* Rp 590 miliar di pasar saham.

Oleh **Triyan Pangastuti**

Sejalan dengan itu, premi *credit default swap* (CDS) Indonesia lima tahun naik ke level 137,03 basis poin (bps) per 16 Juni 2022 dari 117,31 bps per 10 Juni 2022. Berdasarkan data setelmen hingga Juni 2022 (*year to date/yttd*), nonresiden alias pemodal asing membukukan *net sell* Rp 96,49 triliun di pasar SBN dan beli bersih (*net buy*) Rp 70 triliun di pasar saham.

CDS merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui risiko berinvestasi di instrumen SBN. Apabila level CDS meningkat, risiko berinvestasi di SBN semakin tinggi. Sebaliknya, jika CDS turun, risiko investasi semakin rendah.

Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menyatakan, rupiah ditutup melemah di level (bid) Rp 14.765 per dolar AS pada Kamis (16/6). Selanjutnya, *yield* SBN 10 tahun naik ke level 7,36%. Indeks dolar melemah ke level 103,63, sedangkan *yield US Treasury* (UST) 10 tahun naik ke level 3,195%.

Selanjutnya, Jumat (17/6), rupiah dibuka melemah di level (bid) Rp 14.820 per dolar AS. Alhasil, *yield* SBN

10 tahun naik di level 7,39%.

Di sisi lain, Erwin menyatakan, berdasarkan Survei Pemantauan Harga minggu III Juni 2022, inflasi pada periode ini diperkirakan mencapai 0,43% (*month to month/mtm*). Penyumbang utama inflasi hingga pekan ketiga Juni 2022 adalah cabai merah sebesar 0,14% (mtm), cabai rawit sebesar 0,10% (mtm), bawang merah sebesar 0,06% (mtm), telur ayam ras 0,05% sebesar (mtm), tomat sebesar 0,03% (mtm), bayam dan air kemasan masing-masing sebesar 0,02% (mtm), kangkung, ikan kembung.

Selanjutnya, nasi dengan lauk, sabun deterjen bubuk/cair, dan rokok kretek filter masing-masing sebesar 0,01% (mtm). Sementara itu, komoditas yang menyumbang deflasi pada periode ini adalah minyak goreng sebesar 0,05% (mtm), angkutan antarkota dan daging ayam ras masing-masing sebesar 0,03% (mtm), serta daging sapi, bawang putih, udang basah, dan emas perhiasan masing-masing sebesar 0,01% (mtm).

“Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait dan terus mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan

guna mendukung pemulihan ekonomi lebih lanjut,” kata dia, akhir pekan lalu.

Kinerja Rupiah

Sementara itu, Kepala Departemen Pengelolaan Moneter BI, Edi Susianto mengatakan, kenaikan suku bunga The Fed juga telah memicu kekhawatiran pasar. Alhasil, kinerja rupiah melemah pada awal perdagangan Jumat (17/6) di level Rp 14.835 per dolar AS.

Edi Susianto, pergerakan mata uang saat pembukaan pasar di beberapa negara kawasan Asia bervariasi, ada yang melemah dan menguat. Artinya, bukan hanya rupiah yang melemah terhadap dolar AS, melainkan sejumlah mata uang negara berkembang lainnya.

Dia menjelaskan, kenaikan suku bunga The Fed pada Rabu (15/6) sudah diperkirakan oleh pasar atau *price in*. Namun, sebagian pelaku pasar masih meresponnya dengan melakukan strategi mengalihkan investasi ke kurs dolar AS dan memilih aset yang lebih aman (*safe haven*) serta *cash market*.

Kekhawatiran ini, kata dia, juga telah memicu gelombang *capital outflow* di pasar keuangan negara berkembang termasuk Indonesia. Alhasil, dolar AS menguat pascakenaikan suku bunga

The Fed.

“Belakangan ini, indeks dolar naik terus, bahkan sampai di atas 105, setelah sebelumnya tertinggi di level 104,85,” tegas dia.

Meski demikian, dia menyatakan, BI memastikan akan menjaga stabilitas pasar keuangan khususnya nilai tukar rupiah, dengan melakukan tiga lapis intervensi yakni di pasar valuta asing, obligasi, serta pasar *domestic nondeliverable forward* (DNDF).

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan, pemerintah akan berhati-hati dalam melakukan intervensi SBN. Tujuannya agar rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) bisa terus menurun.

Dia menegaskan, kenaikan suku bunga The Fed dan European Central Bank (ECB) memicu naiknya *cost of fund*. Oleh karena itu, pemerintah harus berhati-hati dan tetap waspada untuk melindungi ekonomi dengan mengurangi ekposur dari utang untuk menurunkan defisit.

“Penerimaan dan sisa lebih pembiayaan anggaran cukup kuat, sehingga bisa mengurangi issuance surat berharga. Kami berharap *debt to GDP ratio* bisa turun,” tegas dia. (ac)

Pembangunan IKN Jadi Stimulus Pemerataan Pertumbuhan Ekonomi

JAKARTA – Pembangunan ibu kota negara (IKN) baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, akan menjadi stimulus pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional. IKN akan berperan sebagai economic super hub dan economic value chain nasional.

IKN akan dikembangkan dalam enam klaster ekonomi strategis, resilient, dan inovatif, meliputi klaster industri teknologi bersih, klaster farmasi terintegrasi, klaster industri pertanian berkelanjutan, klaster ekowisata, klaster kimia dan produk turunan kimia, dan klaster energi rendah karbon. Di samping itu, terdapat juga dua klaster pendukung, yaitu pendidikan abad ke-21 serta smart city dan pusat industri 4.0.

“Pemindahan IKN ke Kalimantan dan menjadikannya sebagai economic super hub merupakan salah satu strategi untuk menggeser porsi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan dari barat menjadi lebih ke timur,” ucap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Sabtu (18/6).

Menurut dia, IKN baru yang diberi nama Nusantara memiliki visi menjadi kota dunia untuk semua, yang dibangun dan dikelola dengan tujuan menjadi kota berkelanjutan, penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, dan menjadi simbol identitas nasional yang merepresentasikan keberagaman bangsa Indonesia, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

“Adanya kolaborasi dan partisipasi setiap pemangku kepentingan terkait

menjadi kunci utama membuat pembangunan IKN ini berjalan lancar. Hadirnya berbagai elemen yang berkontribusi positif, termasuk dari kalangan perguruan tinggi diharapkan mampu mempercepat realisasi investasi dalam pembangunan IKN Nusantara dan sejalan dengan strategi pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah,” ucap Airlangga.

Pemerintah, kata dia, menyadari, masih terjadi kesenjangan pembangunan ekonomi antara Pulau Jawa dan luar Jawa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2021-2022), sekitar 57% penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa dan kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia mencapai 57,78% kuatal I-2022.

Pada periode sama, perekonomian Pulau Kalimantan berkontribusi kepada PDB sebesar 8,29%, Sumatera 21,96%, Sulawesi 6,73%, Bali dan Nusa Tenggara 2,66%, serta Maluku dan Papua 2,58%. Dengan salah satu tujuan untuk mengatasi kesenjangan pertumbuhan ekonomi tersebut, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) pada Februari 2022. Pembentukan UU IKN dilandasi urgensi pemindahan IKN yang sebelumnya telah disampaikan oleh Presiden RI dalam Sidang Tahunan MPR RI tanggal 16 Agustus 2019.

“Arah kebijakan pemindahan IKN pada dasarnya telah diamanatkan dalam RPJMN 2020-2024 sebagai bagian dari prioritas pembangunan kewilayahan kawasan perkotaan

Indonesia. Pembangunan IKN telah diarahkan di luar Pulau Jawa dengan letak yang lebih seimbang secara spasial dan ekonomi, sebagai stimulus pemerataan pertumbuhan perekonomian nasional,” kata dia.

Pembangunan IKN, kata dia, tentunya membutuhkan suplai sumber daya manusia (SDM) berkualitas, khususnya dari penduduk sekitar. Pada titik ini, peningkatan anggaran pendidikan nasional menjadi salah satu jalan bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM. Tahun

2022, telah dialokasikan anggaran pendidikan Rp 542,8 triliun.

“Center of excellence yang dibutuhkan di IKN, misalnya, tentang green city, transformasi digital, dan pembangunan teknologi hydropower di Kalimantan yang di hilirnya bisa membangkitkan industri berbasis hidrogen, bisa didorong dari pusat studi Universitas Balikpapan. Saya juga ingin startup unicorn baru suatu saat bisa muncul dari inisiatif mahasiswa universitas ini,” pungkas Menko Airlangga. (ark)

Cukai Plastik dan Minuman Kemasan Diusulkan Berlaku Tahun Depan

JAKARTA – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (DJBC Kemenkeu) menyebutkan, rencana pengenaan cukai plastik dan minuman berpanis dalam kemasan (MBDK) diusulkan masuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBN) 2023. Artinya, kebijakan itu bisa dieksekusi tahun depan.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani mengatakan, dalam menerapkan berbagai kebijakan, pemerintah dipastikan tidak akan terburu-buru. Sebab, pemerintah harus mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini yang mulai pulih pascapandemi Covid-19.

Dia menambahkan, pemungutan cukai produk itu akan diberlakukan tahun depan jika usulan tersebut disetujui. Hal itu bertujuan memaksimalkan penerimaan negara. Apalagi, kajian cukai dua produk tersebut sudah dilakukan sejak lama.

“Banyak aspek yang harus kita perhatikan. Jadi, kita tidak semata-mata mengejar penerimaan setinggi-tingginya dengan menerapkan cukai, tetapi kemudian kebijakan itu berdampak negatif terhadap ekonomi,” ucap dia, akhir pekan lalu.

Dia menjelaskan, tarif cukai dua produk itu belum ditentukan. Sebab, rencana tersebut masih akan didiskusikan dengan Komisi XI DPR dan Banggar DPR untuk masuk RAPBN 2023.

“Besara tarifnya belum ada sama sekali. Sebab, jumlah tersebut harus kami hitung kembali, kapan berlaku dan bagaimana bentuknya. Jadi, kami belum pernah publish angka yang belum pernah ada hitungan atau kebijakannya,” tegas Askolani.

Rencana pengenaan cukai plastik dan MBDK ini sudah diwacanakan sejak 2016. Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104/2021 tentang Rincian APBN 2022 disebutan target penerimaan dari cukai plastik dan MBDK. Adapun target penerimaan cukai plastik dipatok Rp 1,9 triliun, sedangkan MBDK dipatok sebesar Rp 1,5 triliun. (try)

Pemda Diminta Optimalkan DAK Penanganan Stunting

JAKARTA – Pemerintah menganggarkan dana alokasi khusus (DAK) fisik untuk penanganan stunting sebesar Rp 8,9 triliun tahun ini. Adapun DAK nonfisik untuk penanganan stunting sebesar Rp 1,8 triliun.

Persentase jumlah kabupaten/kota lokus yang mendapat alokasi seluruh bidang DAK stunting menunjukkan peningkatan yang signifikan dari 31,4% pada 2021 menjadi 72% pada 2022. Namun, kenaikan persentase ini masih belum diikuti dengan pemanfaatan desa/kelurahan prioritas hasil analisis situasi sebagai lokasi usulan DAK Stunting.

“Persentase kabupaten/kota lokus yang mendapat alokasi seluruh bidang DAK stunting di 12 provinsi prioritas mencapai 65%, di bawah rata-rata nasional 72%,” ucap Plt Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Subandi Sardjoko, akhir pekan lalu.

Menurut dia, upaya penanganan stunting harus dilakukan secara konvergen, holistik, dan diberikan secara penuh kepada seluruh sasaran. Dalam hal ini, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bekerja secara sinergis saat melakukan intervensi kebijakan.

“Seluruh kabupaten sudah mendapatkan intervensi untuk penurunan stunting. Namun, dari pengamatan kami, anggaran ini belum disertai dengan pelaksanaan konvergensi yang optimal di daerah,” tutur Subandi.

Dia menilai, dalam pelaksanaan penanganan stunting, masih terjadi ketidakselarasan antara desa prioritas stunting yang diusulkan pemda dan desa yang diusulkan mendapatkan DAK. Pemda belum memanfaatkan secara optimal desa/kelurahan prioritas hasil analisis situasi sebagai lokasi usulan DAK air minum dan sanitasi bukan desa/kelurahan prioritas atau desa/kelurahan prioritas dengan cakupan air minum yang memadai.

“Ini bisa juga karena usulan daerah yang belum paham, belum mengusulkan. Ini yang kami harapkan, terutama di 12 provinsi prioritas. Mereka harus mengusulkan agar anggaran ini sampai ke sana, karena dananya sudah tersedia,” ucap Subandi.

Sementara itu, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden Suprayoga Hadi mengatakan, komitmen pimpinan daerah dalam percepatan penurunan stunting harus diwujudkan dalam bentuk aksi nyata kegiatan di lapangan. Salah satunya melalui pengalokasian anggaran dari APBD untuk intervensi prioritas percepatan penurunan stunting.

“Sebab, tidak mudah berkomitmen terhadap apa yang menjadi amanah, menjadi tugas, tanggung jawab dalam konteks ini adalah penurunan stunting,” ucap Suprayoga.

Dia mengatakan, perencanaan dan penganggaran daerah harus berbasis bukti, baik itu data sekunder hasil analisis situasi maupun data kualitatif lainnya, sehingga rencana kerja dapat menasar pada permasalahan utama penanganan stunting yang ada di daerah.

Rencana kerja yang disusun oleh daerah, kata dia, harus dapat diidentifikasi sumber pendanaannya, apakah melalui dana transfer dari pusat seperti DAK, apakah melalui APBD murni, atau melalui dana desa.

“DAK untuk mendukung percepatan penurunan stunting harus dioptimalkan untuk mendukung pelaksanaan program di setiap daerah sehingga usulan DAK harus disusun dengan baik dan fokus,” ucapnya. (ark)

IMJ
PT INDOMOBIL MULTI JASA Tbk

**PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT INDOMOBIL MULTI JASA Tbk
("Perseroan")**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 12 Ayat (2-a) Anggaran Dasar Perseroan, dengan ini diumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan akan diselenggarakan di Jakarta pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022. Rapat Perseroan akan dilaksanakan secara elektronik dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020.

Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (3-a) Anggaran Dasar Perseroan, Pemanggilan Rapat beserta agenda ("Pemanggilan Rapat") akan diumumkan pada hari Selasa, tanggal 5 Juli 2022 dalam surat kabar harian Bisnis Indonesia dan Investor daily serta situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web Perseroan.

Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, tanggal 4 Juli 2022.

Sebagai upaya pencegahan penyebaran dan/atau pengendalian COVID-19, Perseroan menghimbau kepada pemegang saham untuk menghadiri Rapat Perseroan secara elektronik melalui eASY KSEI atau pemegang saham dapat memberikan kuasa menggunakan format surat kuasa yang akan tersedia di situs web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan hari Selasa tanggal 26 Juli 2022.

Pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara Rapat adalah pemegang saham yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan dan dengan memperhatikan Pasal 16 POJK No. 15/2020 bahwa usulan tersebut harus disampaikan secara tertulis dan telah diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat.

Jakarta, 20 Juni 2022

**Direksi
PT INDOMOBIL MULTI JASA Tbk**

CIMB NIAGA

PEMBERITAHUAN
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap III Tahun 2020

PT Bank CIMB Niaga Tbk ("Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap III Tahun 2020 (selanjutnya disebut Sukuk Mudharabah) bahwa sesuai Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah ke-9 periode : 27 Maret 2022 s/d 27 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

No	PARAMETER	JUMLAH	
		SERI B	SERI C
1	Portofolio Pembiayaan dengan Akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ)		25.745.509.000,000
2	Pendapatan Pembiayaan dari Akad MMQ		154.300.000,000
3	Nilai Sukuk Mudharabah	287.000.000,000	391.000.000,000
4	Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah	17,50%	18,13%
5	Pendapatan Bagi Hasil Pemegang Sukuk Mudharabah + Insentif	5.022.500,000	7.086.875,000
6	Tingkat Bagi Hasil Setara (p.a)	7,00%	7,25%

Sehubungan dengan hal tersebut, pembayaran pendapatan bagi hasil ke-9 Sukuk Mudharabah akan dibayarkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada tanggal 27 Juni 2022.

Jakarta, 20 Juni 2022

EMITEN

CIMB NIAGA

PT BANK CIMB NIAGA Tbk

WALI AMANAT

PermataBank

PT BANK PERMATA Tbk